

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Mardiasmo, 2003, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta
- Miriam Budiarjo, 2008, *Dasar- Dasar Ilmu Politik*, Gramedia , Jakarta.
- Muchsan, 1992, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Liberty, Jakarta.
- Moenir, 2008, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, PT Bumi Aksara , Jakarta
- Nata Saputra, 1988, *Administrasi Negara*, Rajawali , Jakarta.
- Philipus M.Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu, Surabaya
- Prajudi Atmosudirjo, 1994, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ridwan HR, 2013, *Hukum Amministrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Yogyakarta.
- Rosyada, Dede, Dkk, 2005, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*, PT. Prenada Media, Jakarta.
- Ridwan HR, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Yogyakarta
- Sjahan Basah , 1992, *Perlindungan Hukum Atas Sikap Tindak Adinistrasi Negara* , Alumni , Bandung .

Peraturan Perundang – undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 mengenai HAM

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.PR.07.29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS)

Peraturan Pemerintah No.96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/MPAN/7/2003 Tentang pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS) Nomor:HAM-02.OT.02 Tahun 2015.

Website

<http://alisabeladr.blogspot.co.id/2011/11/otonomi-daerah.html> diakses pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 ,pukul 06.42 WIB

<https://visiuniversal.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-dan-macam-macam-hak-asasi.html> diakses pada tanggal 18 Februari pukul 08.00 WIB

<http://kurniawaalex.blogspot.co.id/2015/05/makalah-konsep-dasar-tempat-penitipan.html> diakses pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2016 pada pukul 08.00 WIB

http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf diakses pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 pada pukul 12.00 WIB

OUTLINE

NAMA : RIKI ILHAM

NIM : 1410112021

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

JUDUL : PELAYANAN TERHADAP PENGADUAN
MASYARAKAT DI KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMBAR
SEBAGAI ANDALAS BENTUK PELAYANAN
KOMUNIKASI MASYARAKAT (YANKOMAS)

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penelitian



BAB II TINJAUAN PUSTKAN

- A. Tinjauan Tentang Kewenangan
 - 1. Pengertian kewenangan
 - 2. Sumber sumber kewenangan
- B. Tinjauan Tentang Pelayanan Publik
 - 1. Pengetian Pelayanan Publik
 - 2. Prinsip Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- C. Tinjauan Tentang Hak Asasi Manusia
 - 2. Pengertian Hak Asasi Manusia

3. Macam macam Hak Asasi Manusia
4. Pelanggaran Hak Asasi Manusia

- D. Tinjauan Tentang Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
- E. Tinjauan Tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS)
 1. Pengetian Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS)
 2. Ruang Lingkup Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS)
 3. Prinsip Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS)

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pelayanan terhadap pengaduan masyarakat sebagai bentuk pelayanan komunikasi masyarakat (yankomas) di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM SUMBAR
- B. Tindak Lanjut Jika Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS) Tidak Dilaksanakan Oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Sumatera Barat

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

